



## PEMANFAATAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN UNTUK MENDUKUNG EFEKTIVITAS PROGRAM SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN PUGER

Anindita Widyawati Susanto<sup>\*1</sup>, Ghefira Nur Azzahra<sup>2</sup>,  
Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember, Jember, Indonesia, [aninditawidyawatii@gmail.com](mailto:aninditawidyawatii@gmail.com)<sup>\*1</sup>,  
[ghefira211@gmail.com](mailto:ghefira211@gmail.com)<sup>2</sup>, [reshadwiayupm.feb@unej.ac.id](mailto:reshadwiayupm.feb@unej.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>\*</sup>Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Diajukan :  
5 Juli 2025

Direvisi:  
4 September 2025

Diterima :  
14 September 2025

Dipublikasikan:  
30 September 2025

### Cara Mensitasi Artikel

Susanto, *et al.* (2025).  
Pemanfaatan Sistem  
Pengendalian Manajemen  
untuk Mendukung  
Efektivitas Program  
Subsidi Bahan Bakar  
Minyak bagi Nelayan pada  
Tempat Pelelangan Ikan  
Puger. *Jurnal Inovasi dan  
Kreatif Abdimas (JIKA)*,  
1(3), 95-102.

### ABSTRAK

**Tujuan** - Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk membantu memperbaiki sistem pengelolaan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di UPTD TPI Puger, Kabupaten Jember. Program ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah di lapangan, seperti penyaluran yang tidak merata dan bantuan yang tidak selalu tepat sasaran, sehingga berdampak pada kepercayaan nelayan terhadap pemerintah.

**Metode** - Tim melakukan wawancara langsung dengan pegawai Dinas Perikanan dan UPTD TPI Puger, serta mengumpulkan dokumen pendukung seperti SOP dan surat rekomendasi. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana sistem penyaluran subsidi berjalan dan apa saja kendala yang terjadi.

**Hasil dan Pembahasan** - Ditemukan bahwa sistem pengendalian saat ini meliputi tiga tahap utama: pendaftaran dan verifikasi data nelayan, penyaluran BBM di SPBU khusus, serta pengawasan dan evaluasi. Sayangnya, masih banyak kendala seperti minimnya sosialisasi ke nelayan, lemahnya pengawasan di SPBU, dan kurangnya kerja sama antar lembaga. Program ini memberikan beberapa solusi, seperti memperbanyak sosialisasi, penggunaan sistem digital, dan pembentukan forum kerja sama antar instansi.

**Kontribusi** - Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM subsidi, serta mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

**Kata Kunci:** BBM, Nelayan, Pengendalian, Subsidi.



## PENDAHULUAN

Sektor perikanan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 2,5% hingga 2,7% (Ali Mursit *et al.*, 2022). Selain itu, sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang menjadi kelompok rentan dalam struktur sosial-ekonomi Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan menjanjikan. Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu kendala utama adalah rendahnya efisiensi dalam pengelolaan program-program pemberdayaan nelayan, termasuk di antaranya program bantuan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan kecil (Dewi & Dadiara, 2022).

Di balik kekayaan sumber daya laut yang melimpah, nelayan kecil sebenarnya menyimpan potensi besar bagi perekonomian lokal. Mereka bukan sekadar pencari ikan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan laut bagi masyarakat luas. Artinya, kesejahteraan para nelayan tidak hanya penting untuk kehidupan mereka dan keluarganya, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga ikan konsumsi sehari-hari di tingkat nasional (Jalil *et al.*, 2024).

Sayangnya, dalam kenyataan sehari-hari, nelayan kecil sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan. Mereka sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut, harus menghadapi kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, harga ikan yang sering berubah-ubah, dan minimnya akses pada modal usaha. Semua ini membuat beban mereka semakin berat. Untuk meringankan beban tersebut, pemerintah menghadirkan subsidi BBM sebagai bentuk dukungan. Namun, jika tidak diawasi dan dikelola dengan benar, program ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang sebenarnya tidak berhak menerima, dan pada akhirnya justru tidak sampai kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan.

Subsidi BBM merupakan salah satu program utama pemerintah yang ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya operasional nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Tanpa subsidi ini, banyak nelayan kecil yang akan kesulitan menjalankan usahanya karena harga BBM industri yang terlalu tinggi bagi daya beli mereka. Namun, program ini masih menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti distribusi yang tidak merata, mekanisme administrasi yang rumit, hingga penyalahgunaan kuota oleh pihak-pihak yang tidak berhak (Wulandari *et al.*, 2023). Di sisi lain, tidak semua nelayan tercatat secara administratif sebagai penerima bantuan, yang mengakibatkan subsidi tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan.

Perlu juga diperhatikan bahwa program subsidi BBM merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi keharusan mutlak dalam pelaksanaannya. Setiap liter BBM subsidi yang tidak tepat sasaran berarti kerugian tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga ketidakadilan sosial yang memperburuk ketimpangan di masyarakat pesisir.

Di Kabupaten Jember, khususnya di wilayah Puger, yang dikenal sebagai sentra perikanan tangkap terbesar di kawasan tersebut, program subsidi BBM bagi nelayan dikoordinasikan melalui UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger, yang berada di bawah naungan Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Peran strategis UPTD TPI Puger sangat penting dalam memastikan penyaluran subsidi berjalan dengan efektif, mulai dari proses rekomendasi hingga pencairan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN). Meski demikian, permasalahan serupa juga ditemukan di wilayah ini, di antaranya adalah keterbatasan jumlah SPBUN, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi data yang belum terintegrasi, dan lemahnya sistem pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi (Frostad *et al.*, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengendalian manajemen dalam program bantuan subsidi BBM, khususnya di daerah pesisir yang menjadi pusat aktivitas nelayan kecil. Sistem pengendalian manajemen yang baik seharusnya mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang ketat, agar setiap tahapan dalam penyaluran bantuan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengendalian manajemen yang efektif juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan publik, khususnya dalam distribusi subsidi, pengendalian manajemen menjadi elemen vital dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Stewart, 2021).

Program pengabdian kepada masyarakat ini didesain sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan fokus pada analisis dan penguatan sistem pengendalian manajemen dalam penyaluran subsidi BBM di UPTD TPI Puger. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian saat ini; (2) melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai dinas perikanan untuk menggali permasalahan nyata di lapangan dan memahami implementasi sistem yang berjalan; (3) menyusun hasil temuan serta menyampaikan masukan sederhana kepada mitra sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan mekanisme penyaluran subsidi. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan mitra, diharapkan kegiatan ini tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi mampu membangun sistem berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Urgensi dari kegiatan ini juga didukung oleh fakta bahwa keberhasilan program subsidi BBM sangat ditentukan oleh peran serta seluruh *stakeholder* yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, BPH Migas, operator SPBU, hingga nelayan penerima manfaat. Kolaborasi yang sinergis antar pihak akan memperkuat rantai kebijakan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta mendorong digitalisasi data penerima subsidi sebagai bagian dari transformasi tata kelola yang transparan (Wijaya & Saptanto, 2014).

Dengan latar belakang tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah TPI Puger, Kabupaten Jember. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efektivitas program bantuan subsidi BBM, memperkuat sistem pengendalian manajemen sektor publik, serta memberikan masukan berbasis evidensi bagi perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Pengabdian ini dilakukan dengan observasi dan pendampingan, karena pendekatan ini dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya proses penyaluran subsidi BBM bagi nelayan berlangsung di lapangan. Dengan pendekatan ini, tim pengabdian tidak hanya melihat data dalam bentuk angka, tetapi juga berusaha menggali lebih jauh makna, pengalaman, dan dinamika yang dirasakan oleh para pelaksana program di lapangan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana kebijakan dijalankan, apa saja yang terjadi dalam praktiknya, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat memahami serta menjalankan program tersebut.

Lokasi pengabdian dilakukan di dua tempat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger. Kedua lembaga ini menjadi bagian utama dalam proses administrasi dan teknis program subsidi BBM. Dinas Perikanan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi penerima subsidi, sedangkan UPTD TPI Puger merupakan titik kegiatan para nelayan yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan kebutuhan BBM. Oleh karena itu,

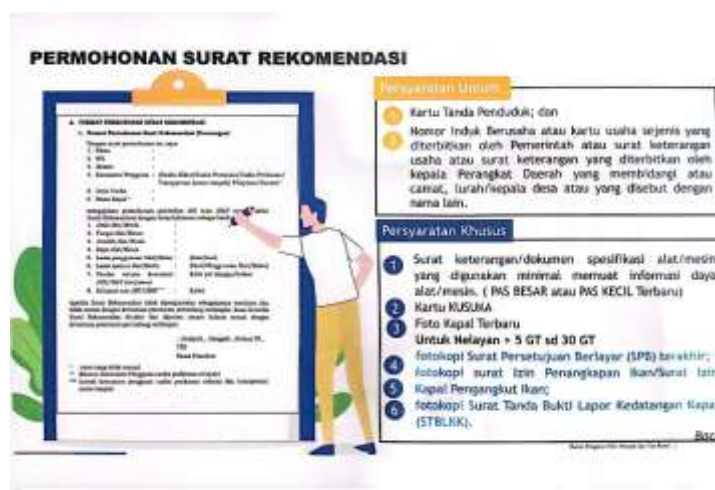
kedua lokasi ini dinilai dapat memberikan informasi yang relevan dan lengkap mengenai bagaimana program ini dijalankan dari hulu hingga hilir.

Pemilihan informan juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan subsidi BBM. Informan yang diwawancarai adalah staf Dinas Perikanan yang menangani langsung program subsidi dan petugas dari TPI Puger yang mengetahui situasi operasional di lapangan. Dalam pengabdian ini, nelayan tidak diwawancarai secara langsung karena keterbatasan waktu, dan karena pengabdian lebih fokus pada bagaimana sistem dan kelembagaan program ini bekerja dari sisi pemerintah daerah. Meski begitu, peneliti tetap berupaya menggali sudut pandang yang mendalam dari pelaksana lapangan yang mengetahui bagaimana program ini berdampak dan dijalankan sehari-hari.



Gambar 1. Proses Wawancara dengan Staff Dinas Perikanan

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Artinya, peneliti sudah menyiapkan pertanyaan sebelumnya, tapi pertanyaan itu bisa berkembang sesuai dengan alur pembicaraan agar informasi yang didapat bisa lebih luas dan tidak terbatas. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan guna menggali pengalaman, pandangan, serta kendala yang mereka hadapi saat program ini dijalankan. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen seperti SOP (standar operasional prosedur), surat rekomendasi, dan dokumen pendukung lainnya yang bisa membantu untuk memahami bagaimana proses penyaluran subsidi ini dijalankan di lapangan dan apakah sesuai dengan aturan yang berlaku.



Gambar 2. Persyaratan permohonan surat rekomendasi

Agar data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen untuk melihat apakah semuanya saling mendukung. Peneliti juga menjaga etika

selama proses pengumpulan data, misalnya dengan tidak menyebutkan identitas informan dan meminta izin secara lisan sebelum wawancara dimulai. Semua ini dilakukan agar proses pengabdian berjalan dengan jujur, terbuka, dan tetap menjaga privasi para pihak yang terlibat (Pamungkas *et al.*, 2022). Melalui cara ini, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana subsidi BBM disalurkan, apa saja kendalanya, dan bagaimana upaya perbaikannya ke depan.



Gambar 3. Proses Wawancara di UPTD TPI Puger

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan langsung serta wawancara dengan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan petugas lapangan di UPTD TPI Puger, diperoleh gambaran bahwa proses penyaluran subsidi BBM untuk nelayan dilaksanakan melalui tiga tahap penting, yaitu pendaftaran dan verifikasi, penyaluran BBM di SPBU khusus nelayan, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi. Ketiga tahapan ini dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen yang bertujuan memastikan agar bantuan subsidi benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.

Tahap pertama diawali dengan proses pendaftaran. Nelayan dapat mengajukan permohonan melalui sistem daring milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau secara langsung ke kantor Dinas Perikanan. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi KTP, Pas Kapal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan surat keterangan dari kelompok nelayan. Setelah dokumen diverifikasi oleh petugas, nelayan yang memenuhi syarat akan diberikan surat rekomendasi sebagai dasar penerbitan Kartu BBM Nelayan. Kartu ini mencantumkan data pribadi nelayan serta kuota BBM subsidi yang tersedia untuk mereka.

Tahapan kedua adalah penyaluran BBM yang dilakukan melalui SPBU khusus nelayan di Kecamatan Puger. Nelayan menunjukkan kartu subsidi mereka kepada petugas SPBU untuk diverifikasi, dan jika data cocok, barulah dilakukan pengisian BBM. Secara prosedural, sistem ini cukup tertata. Namun, berdasarkan keterangan beberapa informan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya disiplin. Ada petugas SPBU yang belum menjalankan proses verifikasi secara menyeluruh, bahkan dalam beberapa kasus, pengisian dilakukan tanpa pengecekan data, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Tahap ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Secara formal, pengawasan dilakukan oleh BPH Migas dan aparat penegak hukum, sementara evaluasi dilakukan secara rutin oleh dinas teknis di daerah. Namun, informasi dari lapangan menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Sanksi terhadap pelanggaran juga belum ditegakkan secara konsisten, sehingga menimbulkan keraguan atas keadilan dan efektivitas dari pelaksanaan program subsidi BBM ini.



Gambar 4. Ikut serta dalam proses evaluasi program

## Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerangka sistem pengendalian manajemen pada program subsidi BBM ini sebenarnya telah mencakup tiga unsur utama, yaitu perencanaan administratif, pelaksanaan teknis, serta proses pengawasan dan evaluasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang cukup signifikan.

Salah satu kendala utama adalah minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan, khususnya mereka yang tinggal di daerah pesisir yang sulit dijangkau. Banyak dari mereka belum memahami mekanisme pendaftaran atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi nelayan dalam program subsidi. Temuan ini sejalan dengan pernyataan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pemerintah (Gilbert Johanis Siby *et al.*, 2024). Pendekatan penyuluhan juga secara langsung mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih intensif, partisipatif, dan menggunakan media lokal perlu diterapkan agar pesan program dapat menjangkau seluruh nelayan. Selain sosialisasi, pelaksanaan pengawasan di SPBU nelayan juga masih lemah. Walaupun telah tersedia sistem verifikasi melalui kartu BBM, dalam praktiknya petugas belum konsisten melakukan pengecekan terhadap data dan kuota. Hal ini menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan. Subsidi BBM hanya dapat berhasil jika didukung oleh pengawasan yang ketat (Suryawati & Apriliani, 2015). Selain itu, hambatan administratif dan terbatasnya jumlah SPBU menjadi penyebab utama subsidi tidak tersalurkan secara optimal kepada nelayan kecil (Wulandari *et al.*, 2023). Lemahnya sistem pengawasan juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program ini. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan sistem pelaporan berbasis digital, disertai dengan pengaktifan SPDN dan pembangunan SPBU mini yang dekat dengan wilayah tangkapan nelayan.

Koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi persoalan penting. Meski banyak lembaga terlibat, mulai dari Dinas Perikanan, BPH Migas, SPBU, hingga kelompok nelayan, koordinasi antar lembaga ini masih berlangsung secara sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik. Pengabdian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pemerintah (Fajri *et al.*, 2021). Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan untuk menciptakan transparansi. Oleh karena itu, pembentukan forum koordinasi lintas instansi di tingkat kabupaten menjadi salah satu solusi yang dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan program. Selain itu, ditemukan pula bahwa belum semua pelaksana teknis di lapangan memahami secara detail kebijakan teknis dari pusat. Terkadang, kebijakan pusat tidak disertai dengan petunjuk teknis yang jelas, sehingga memicu perbedaan penafsiran antar pelaksana. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik. Untuk itu, komunikasi vertikal antara pusat dan daerah harus diperkuat, serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana melalui pelatihan teknis dan pendampingan menjadi hal yang mendesak. Lebih jauh lagi, nelayan sebagai

penerima manfaat juga perlu diberikan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Bantuan dalam bentuk subsidi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pembinaan agar subsidi tersebut digunakan secara tepat dan produktif. Pendampingan bisa mencakup pelatihan pengelolaan keuangan, pencatatan hasil tangkapan, serta pengembangan usaha perikanan skala kecil. Integrasi antara program subsidi dengan program pemberdayaan ekonomi nelayan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat dampak kebijakan secara jangka panjang. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen subsidi BBM di UPTD TPI Puger telah memiliki dasar struktur yang memadai. Namun agar program ini benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekonomi pesisir, dibutuhkan upaya perbaikan secara komprehensif, baik dari segi sosialisasi, pengawasan, koordinasi lintas lembaga, maupun pendampingan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

## **KESIMPULAN**

Program subsidi BBM untuk nelayan di UPTD TPI Puger sangat membantu dalam mengurangi beban biaya operasional melaut, sehingga nelayan bisa lebih produktif. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah yang perlu dibenahi. Mulai dari kurangnya informasi yang diterima nelayan tentang cara mendaftar, lemahnya pengawasan di SPBU tempat penyaluran BBM subsidi, sampai kurangnya kerja sama antar instansi yang terlibat.

Melalui kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa sistem pengendalian yang baik sangat penting agar program ini bisa berjalan lebih efektif. Upaya yang bisa dilakukan antara lain: menyebarluaskan informasi secara rutin dan menyeluruh kepada nelayan, menggunakan teknologi untuk memantau distribusi BBM, serta membentuk forum koordinasi yang melibatkan Dinas Perikanan, BPH Migas, operator SPBU, dan perwakilan nelayan. Jika semua pihak bekerja sama dan sistem pengawasan diperkuat, maka program ini bisa memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan mendukung ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Supaya program subsidi BBM untuk nelayan bisa berjalan lebih baik, Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi, terutama ke nelayan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini penting agar mereka benar-benar paham cara mendaftar dan memanfaatkan program tersebut. Pengawasan juga perlu diperkuat dengan melibatkan pihak lain seperti BPH Migas dan aparat hukum, serta memberi sanksi tegas jika ada penyalahgunaan. Selain itu, semua pihak yang terlibat mulai dari nelayan, petugas SPBU, sampai tokoh masyarakat harus diajak ikut serta agar program ini lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pengabdian lanjutan, sebaiknya wawancara dilakukan tidak hanya ke pegawai saja, tapi juga ke nelayan dan pihak-pihak lain yang benar-benar terlibat langsung di lapangan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Jember, khususnya kepada seluruh pegawai dan staf UPTD TPI Puger, yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam penyusunan jurnal ini. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses pengabdian hingga jurnal ini terselesaikan. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan program subsidi BBM bagi nelayan.

## REFERENSI

- Ali Mursit, Agus Wahyono, & Yuli Setiawan. (2022). Strategi Peningkatan Ekspor Produk Kelautan Dan Perikanan Ke Pasar Eropa. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 9–24. <https://doi.org/10.54964/manajemen.v6i2.200>
- Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt) Di Kabupaten Maluku Barat Daya. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2017), 82–100. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2417>
- Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). Collaborative Governance Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa*, 7(2), 73–88. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2713>
- Frostad, J. J., Nguyen, Q. A. P., Baumann, M. M., Blacker, B. F., Marczak, L. B., Deshpande, A., Wiens, K. E., LeGrand, K. E., Johnson, K. B., Abbasi-Kangevari, M., Abdoli, A., Abolhassani, H., Abreu, L. G., Abrigo, M. R. M., Abu-Rmeileh, N. M. E., Adekanmbi, V., Agrawal, A., Ahmed, M. B., Al-Aly, Z., ... Reiner, R. C. (2022). Mapping development and health effects of cooking with solid fuels in low-income and middle-income countries, 2000–18: a geospatial modelling study. *The Lancet Global Health*, 10(10), e1395–e1411. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00332-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00332-1)
- Gilbert Johanis Siby, Arie J. Rorong, & Arie J. Rorong. (2024). JAP\_2024\_1\_gilbert+sibi. *JAP No.1 Vol. X (2024) Hal. 1– 14 Publish.*, 3.
- Jalil, A., Jers, L. O. T., Ashmarita, Alias, & Rahman, H. (2024). Potensi ekonomi masyarakat nelayan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan di Kelurahan Petoaha Kota Kendari. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(2), 175–184. <https://doi.org/10.33772/jsep.v9i2.84>
- Pamungkas, M. I., Iftita, N., Salu, T. I., Riefad, F., & Wijaya, Y. (2022). *Jurnal Mahasiswa Antropologi*. 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.31947/jma.v2i1.2749>
- Stewart, S. E. (2021). *Managerial Control Effects on Information Security Policy Compliance Intentions: Considerations of Formal and Informal Modes of Control*.
- Suryawati, S. H., & Apriliani, T. (2015). Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 37–46.
- Wijaya, R. A., & Saptanto, S. (2014). Persepsi Dan Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi Bbm. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 185. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v4i2.608>
- Wulandari, W., Pratikto, R., & Dewi, E. (2023). Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Solar Untuk Nelayan Kecil. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 13–22.